

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1.1.1 Pengertian LQ45

Indeks harga saham merupakan indikator pergerakan harga saham. Indeks dapat dijadikan sebagai pedoman bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal. Salah satu index harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut BEI) adalah LQ45. Index LQ45 diluncurkan pada bulan Februari 1997 yang terdiri dari 45 perusahaan dengan likuiditas (*LiQuid*) yang tinggi yang terdaftar di BEI dan diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, perusahaan-perusahaan tersebut juga dipertimbangkan berdasarkan kapitalisasi pasar. BEI secara rutin memantau perkembangan perusahaan yang masuk dalam perhitungan indeks LQ45. Untuk penggantian saham akan dilakukan dalam kurun waktu enam bulan sekali (setiap awal Februari dan Agustus).

#### 1.1.2 Kriteria Indeks LQ45

Dalam penentuan perusahaan yang masuk dalam Indeks LQ45, diperlukan beberapa kriteria yang dijadikan sebagai acuan. Ukuran utama likuiditas transaksi dalam Indeks LQ45 adalah nilai transaksi di pasar reguler. Dalam mempertajam kriteria likuiditas, maka sejak bulan Januari 2005 jumlah hari perdagangan dan frekuensi transaksi dimasukkan sebagai ukuran likuiditas. Kriteria-kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Saham telah tercatat di BEI selama paling sedikit tiga bulan.
- b. Aktivitas transaksi perusahaan di pasar reguler yaitu nilai, volume, dan frekuensi transaksi.
- c. Masuk kedalam urutan 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar reguler (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir).
- d. Kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu (rata-rata nilai kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir).

#### 1.1.3 Daftar Perusahaan Objek Penelitian

Dalam indeks LQ45 terdapat 45 perusahaan dengan likuiditas tinggi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Setiap enam bulan sekali yaitu pada awal Februari dan Agustus akan muncul daftar baru dimana perusahaan ada yang keluar, ada yang masuk dan ada yang tetap bertahan di indeks LQ45. Objek penelitian didasarkan pada kriteria yaitu perusahaan yang termasuk dalam LQ45 periode tahun 2009 – 2012 yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesiadari tahun 2009 – 2012. Kriteria lainnya yaitu perusahaan menerbitkan *annual report* dari tahun 2009 – 2012 serta perusahaan *non*-perbankan. Daftar perusahaan objek penelitian dapat dilihat di Tabel 1.1 :

Tabel 1.1  
Daftar Perusahaan Objek Penelitian

No.	Kode Efek	Nama Emiten
1.	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.
2.	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.
3.	ASII	Astra International Tbk.
4.	INCO	International Nickel Indonesia Tbk.
5.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
6.	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.
7.	LSIP	London Sumatera Plantation Tbk.
8.	MEDC	Medco Energi International Tbk.
9.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
10.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
11.	SMGR	Semen Gresik (Persero) Tbk.
12.	TINS	Timah (Persero) Tbk.
13.	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
14.	UNSP	Bakrie Sumatera Plantation Tbk.
15.	UNTR	United Tractors Tbk.

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Tujuan pokok didirikan suatu perusahaan menurut Sudana (2011:7) yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik perusahaan (*wealth of the shareholder*), maka perusahaan harus bersaing secara sehat untuk mendapatkan alternatif pendanaan. Pendanaan merupakan salah satu fungsi yang penting karena untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Sumber pendanaan ada dua yaitu dari dalam perusahaan (*internal financing*) dan pembiayaan dari luar perusahaan (*external financing*). Sumber pendanaan internal berupa pemanfaatan laba yang ditahan (*retained earnings*) yaitu laba yang tidak dibagikan sebagai dividen. Sedangkan untuk pendanaan eksternal diperoleh dengan perusahaan meminjamkan ke pihak lain atau menjual saham ke masyarakat (*go public*) di pasar modal.

Dividen merupakan keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan kepada investor. Dividen dapat diberikan kepada investor setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Dalam mendapatkan dividen, investor harus memegang saham dalam kurun waktu yang lama hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode yang diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai dan dividen saham. (Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) diakses tanggal 23 Maret 2014 jam 22.16)

Pertumbuhan perusahaan dan dividen adalah dua hal yang menjadi tujuan perusahaan tetapi merupakan hal yang saling berlainan. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus menetapkan kebijakan dividen, yaitu kebijakan yang dibuat oleh perusahaan dalam menetapkan proporsi pendapatan yang dibagikan sebagai dividen dan proporsi laba yang ditahan perusahaan untuk diinvestasikan kembali.

Kebijakan dividen mempunyai arti penting untuk perusahaan. Untuk para pemegang saham atau investor, dividen merupakan tingkat pengembalian investasi mereka. Bagi pihak manajemen, dividen merupakan arus kas yang keluar yang dapat mengurangi kas perusahaan. Bagi kreditor, dividen dapat

menjadi sinyal mengenai kecukupan kas perusahaan untuk membayar bunga atau bahkan melunasi pokok pinjaman. (Agustina, 2013: 1)

Kebijakan dividen dapat berdampak pada program pendanaan yang berkaitan dengan sumber pembiayaan (*financing*) perusahaan. Jika perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen maka dapat mengurangi sumber dana internal (*internal financing*). Tetapi apabila perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan dana dari sumber dana internal semakin besar dan hal ini menjadikan posisi *financial* semakin kuat dan semakin kecil tingkat ketergantungan kepada sumber dana eksternal (*external financing*).

Kebijakan dividen merupakan hal penting yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan dimasa yang akan datang yang merupakan tujuan utama perusahaan. Pembayaran dividen yang lebih besar cenderung akan meningkatkan harga saham yang berarti dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pembayaran dividen yang besar dapat mengakibatkan berkurangnya sisa dana yang tersedia untuk berinvestasi. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya tingkat pertumbuhan perusahaan yang dapat menurunkan harga saham. Berdasarkan hal ini nampak bahwa kebijakan dividen mempunyai dua efek yang saling bertentangan.

Setiap perusahaan menginginkan pertumbuhan sehingga laba ditahan menjadi sangat berarti bagi pemenuhan dana *intern*. Disamping itu perusahaan juga ingin tetap membayarkan dividen kepada pemegang saham demi tercapainya nilai perusahaan melalui peningkatan harga saham perusahaan. Disini juga terdapat kepentingan kreditur yang dapat mempengaruhi besarnya dividen yang dibayarkan. Hutang yang meningkat dapat mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi para pemegang saham termasuk dividen yang diterima karena kewajiban tersebut lebih diprioritaskan daripada pembagian dividen. Oleh karena itu, manajemen harus memperhatikan kesejahteraan para pemegang saham, selain harus menjaga pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidup dalam menentukan kebijakan perusahaan.

Kebijakan dividen menurut Sudana (2011:167) berhubungan dengan besarnya *dividend payout ratio*, yaitu presentase besarnya laba bersih setelah pajak yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Semakin tinggi *dividend payout ratio* yang ditetapkan perusahaan maka semakin kecil pula dana yang akan ditanamkan kembali didalam perusahaan yang berarti akan menghambat pertumbuhan perusahaan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi *dividend payout ratio*, antara lain dana yang dibutuhkan perusahaan, likuiditas, kemampuan perusahaan untuk meminjam, nilai informasi dividen, pengendalian perusahaan, pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak kreditur, dan inflasi.

Kepemilikan saham di perusahaan di Indonesia cenderung memiliki struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi. Kondisi ini menggambarkan pengendalian masih berkonsentrasi pada investor besar (pemegang saham mayoritas). Adanya ketimpangan dalam fungsi pengendalian ini mengakibatkan para pemegang saham mayoritas dapat membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri dengan beban para pemegang saham minoritas. Disini pihak pengambil keputusan yaitu

pemegang saham mayoritas dan pihak penerima keputusan yaitu pemegang saham minoritas. Pada kondisi ini, pemegang saham minoritas tidak menyukai kebijakan menahan laba akan tetapi lebih memilih dividen.

Pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penerapan kebijakan dividen dalam perusahaan. Pemegang saham mayoritas dapat menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas diperlukan penerapan *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut GCG). *Corporate governance* menjadi isu utama pada negara-negara sedang berkembang setelah terungkapnya skandal keuangan berskala besar (misalnya skandal Enron) atau krisis di Indonesia pada tahun 1998.

Menurut penelitian Husnan (Wulandari, 2013:8) penyebab krisis 1998 antara lain struktur kepemilikan saham yang hanya berkonsentrasi ke beberapa pemegang saham, pasar modal yang masih dalam tahap pengembangan dan struktur hukum yang lemah. Selain itu tidak adanya akuntabilitas perusahaan, keterbukaan informasi yang rendah, serta kolusi, korupsi dan nepotisme mencerminkan praktik *governance* yang lemah.

Pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penetapan kebijakan dividen. Pemegang saham mayoritas dapat menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham minoritas. Hal ini disebut dengan *agency problem* dimana menurut penelitian Fan and Wong (Wulandari, 2013:25) *agency problem* biasanya terjadi di perusahaan yang kepemilikan sahamnya terkonsentrasi. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas diperlukan penerapan *good corporate governance*.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 Pasal 3 tentang penerapan GCG pada BUMN, terdapat lima prinsip GCG yaitu transparansi (*transparency*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*). Dengan implementasi mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari adanya masalah keagenan.

Penelitian Swabawani (2010) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kebijakan *Dividen Payout* (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2008)” menunjukkan bahwa *good corporate governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa perusahaan dengan praktik *corporate governance* yang baik maka akan semakin tinggi dividen yang dibayarkan kepada investor.

Mekanisme penerapan *good corporate governance* dapat digunakan untuk mengatasi masalah keagenan tersebut, dilihat baik dari ukuran dewan direksi dan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial serta komite audit.

Dewan direksi atau *Board of Director* (BoD) memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan yang akan diambil perusahaan termasuk dalam menentukan kebijakan dividen. Fungsi dari dewan direksi adalah untuk mengurus perusahaan. Sedangkan dewan komisaris atau *Board of*

*Commissioner* (BoC) berperan dalam mengawasi implementasi kebijakan dewan direksi dalam menjalankan perusahaan. Dewan komisaris diharapkan mampu meminimalkan permasalahan agensi antara dewan direksi dengan pemegang saham yang berkaitan dengan kebijakan dividen. Di dalam perusahaan peran dewan direksi dan komisaris sangat diperlukan dalam implementasi *good corporate governance*. Untuk ukuran dewan direksi dan komisaris dapat dilihat dari jumlah anggota dewan direksi dan komisaris dalam perusahaan.

Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki afiliasi dengan manajemen, sehingga dapat menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajemen melalui tugasnya memonitor dan mengawasi pelaksanaan keputusan manajemen. Komisaris independen diharapkan dapat mewakili kepentingan minoritas sehinggadapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Berdasarkan penelitian Dharmastuti (2013) dijelaskan bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh negatif kepada kebijakan dividen. Karena dinilai tidak efektif dalam melakukan pengawasan dan diduga independensi komisaris tidak sungguh independen pada manajemen.

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang setara aktif dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan antara kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Berdasarkan penelitian Handayani & Hadinugroho (2009) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen.

Komite audit berdasarkan definisi Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) adalah “Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan”. Dalam perusahaan komite Audit mempunyai peran yang penting dalam memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Keefektifan fungsi komite audit berpengaruh pada kontrol perusahaan yang lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisir. Berdasarkan penelitian Wijayanti & Supatmi (2009) komite audit berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut sehingga penulis memilih topik penyusunan skripsi ini dengan judul :

**“PENGARUH PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN (Studi Pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012)”**

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan *good corporate governance* (ukuran dewan direksi (BoD), ukuran dewan komisaris (BoC), proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, *Return on Asset* (ROA), *growth*, dan *firm size*) berpengaruh secara simultan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 ?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada ukuran dewan direksi terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 ?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada ukuran dewan komisaris terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 ?
4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada proporsi komisaris independen terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 ?
5. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 ?
6. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada komite audit terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 ?
7. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada *Return on Assets* (ROA) terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 ?
8. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada *growth* terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 ?
9. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada *firm size* terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 ?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan *good corporate governance* (ukuran dewan direksi (BoD), ukuran dewan komisaris (BoC), proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, *Return on Asset* (ROA), *growth*, dan *firm size*) secara simultan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.
4. Untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.
5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.

6. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.
7. Untuk mengetahui pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.
8. Untuk mengetahui pengaruh *growth* terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.
9. Untuk mengetahui pengaruh *firm size* terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk semua pihak yang terkait dalam penelitian ini serta berkepentingan dan memiliki perhatian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dividen.

### **1. Kegunaan Teoritis**

- Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan deviden.

### **2. Kegunaan Praktis**

- Bagi Regulator

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai efektivitas peraturan yang dikeluarkan oleh regulator berkaitan dengan *corporate governance* agar tercapai peningkatan praktik pengelolaan perusahaan yang baik.

- Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi sehingga dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi ke perusahaan dapat mengetahui besarnya dividen yang akan mereka terima.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini dipaparkan tentang tinjauan umum perusahaan yang akan diteliti, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan batasan penelitian.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini berisi teori-teori yang akan digunakan untuk membahas tentang penelitian ini antara lain mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) dan kebijakan dividen serta turut dipaparkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

### **Bab III Metodologi Penelitian**

Pada bab ini memaparkan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, tahapan di dalam penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini disampaikan mengenai pembahasan permasalahan yang sudah dirumuskan. Pada tahap ini juga dilakukan tahapan analisis dari data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner menggunakan metode analisis yang sebelumnya ditetapkan.

### **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini meliputi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian serta memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait.